

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBEDAKAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SETIAP SATUAN PENDIDIKAN SMK NEGERI KOTA TEBING TINGGI

Rakhmawati Purba

Dosen STIE Bina Karya Tebing Tinggi

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang membedakan pembiayaan pendidikan di setiap satuan pendidikan SMK Negeri Kota Tebing Tinggi.

Pendidikan memegang peranan penting dalam mengubah kondisi kehidupan seseorang di dalam suatu tatanan masyarakat yang membutuhkan pengorbanan dalam bentuk biaya. Ketersediaan dana pendidikan sejak dulu masih menjadi masalah baik dalam segi jumlah maupun mutunya. Di negara berkembang, termasuk Indonesia sumber dana untuk membiayai pendidikan berasal dari pemerintah, dalam hal ini dari APBN dan APBD yang besarnya tergantung pada kemampuan negara dan komitmennya terhadap pendidikan.

Dalam mengurangi tingkat pengangguran atau meminimalis pengangguran kota Tebing Tinggi, pemerintah daerah merumuskan strategi pendidikan kejuruan. Dengan memperhitungkan besarnya biaya pendidikan pada satuan pendidikan SMK, meliputi biaya penyelenggaraan dan biaya pribadi peserta didik, diharapkan pemerintah selaku salah satu sumber pembiayaan lebih menyalurkan bantuan dana pada SMK.

Jenis penelitian ini memakai teknik analisis deskriptif kuantitatif. Objek penelitian adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri kota Tebing Tinggi. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik SMK Negeri Tebing Tinggi. Metode mengumpulkan data memakai tehnik Triangulasi (wawancara, kuesioner dan observasi).

Faktor yang membedakan pembiayaan pada tiap SMK Negeri adalah besarnya dana komite sekolah dan jumlah peserta didik, status sosial ekonomi peserta didik serta biaya praktek

yang diterapkan sesuai tuntunan kurikulum yang dipakai.

Kata Kunci : Analisis Faktor-faktor, Pembiayaan Pendidikan

PENDAHULUAN

Investasi pendidikan adalah investasi manusia yang dapat menjadikan manusia lebih berdaya, lebih mampu untuk berkarya dan lebih mampu dalam memecahkan kesulitan hidup serta memperoleh penghidupan yang lebih layak.

Untuk menghasilkan manusia berpendidikan diperlukan pengorbanan yang diterjemahkan menjadi biaya atau dana. Biaya atau dana merupakan suatu faktor yang tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan. Oleh karena itu dapat diperkirakan bagaimana sulitnya seseorang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk akses pada pendidikan yang bermutu.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi biaya dan pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan sekolah adalah:

1. Adanya kenaikan harga-harga (rising prices)
2. Adanya perubahan relative dalam gaji guru (teacher's salaries)
3. Adanya perubahan populasi dan kenaikan prosentase anak di sekolah negeri.
4. Meningkatnya standar pendidikan (educational standard)
5. Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah.
6. Meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi (higher education)

Menurut PP No 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, bahwa biaya pendidikan meliputi :

- Biaya Satuan Pendidikan Sekolah, yang terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi ialah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Biaya operasional meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.
- Biaya Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Pendidikan, meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- Biaya Pribadi Peserta Didik, merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- Beasiswa, adalah bantuan untuk orang yang masih sekolah agar mereka dapat menyelesaikan sekolahnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk dana untuk menunjang biaya-biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh anak sekolah selama masa pendidikan.

Kembali kepada pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan pada kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, termasuk pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah Menengah Kejuruan dibentuk untuk mencetak peserta didik yang berkompeten dan siap menghadapi dunia kerja. Supriadi (2006:182), menyebutkan bahwa dibanding dengan SMA, SMK juga berbeda dalam hal kelembagaannya. SMK diarahkan untuk menyiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga semi-profesional.

SMK memiliki berbagai jurusan yang memang dibuat dengan kurikulum yang sedikit berbeda dibanding kurikulum SMA. Jurusan di SMK juga lebih bervariasi dibandingkan dengan jurusan di SMA, yang hanya terdiri dari ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan Sosial (IPS) dan bahasa. SMK Negeri di kota Tebing Tinggi ada 4 satuan pendidikan dengan jurusan yang berbeda-beda:

1. Satuan pendidikan SMK Negeri 1, terdapat jurusan administrasi perkantoran, pemasaran, desain visual dan akuntansi. Sering disebut SMEA.
2. Satuan pendidikan SMK Negeri 2, terdapat jurusan teknik otomotif, teknik audio visual, teknik komputer jaringan, teknik rekayasa perangkat lunak, teknik instansi tenaga listrik dan teknik sepeda motor. Sering disebut STM.
3. Satuan pendidikan SMK Negeri 3, terdapat jurusan akomodasi, jasa boga, jasa kecantikan, tata busana.
4. Satuan pendidikan SMK Negeri 4, terdapat jurusan teknik komputer jaringan, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura dan teknik pengolahan hasil pertanian.

Adapun pengelolaan biaya pendidikan ini berkaitan dengan peran pemerintah dan sekolah. Peran pemerintah dimana pemerintah seharusnya memperhitungkan besarnya biaya yang harusnya diberikan kepada sekolah. Bastian (2006:165) menyebutkan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah untuk sektor pendidikan selama ini masih jauh dari standar minimal yang dianjurkan. Pola pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah belum berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa keterlibatan pemerintah kepada dunia pendidikan masih relatif kecil.

Peran sekolah dalam pengelolaan pendidikan dengan memperhitungkan besarnya biaya sesuai dengan aktivitas / kegiatan dan kebutuhan masing-masing jurusan / keahlian yang ada. Dengan penentuan biaya berdasarkan aktivitas atau kegiatan, dapat membantu pihak sekolah untuk mengambil keputusan dan membantu

dalam perbaikan secara berkesinambungan. Hal ini dapat membantu dalam menentukan mana biaya yang relevan dengan pembelajaran dan mana biaya yang kurang relevan sehingga bisa dilakukan analisis yang akurat agar pembiayaan pendidikan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pada SMK Negeri yang ada dikota Tebing Tinggi, hal diatas belum sepenuhnya dilakukan. Penentuan biaya pendidikan tiap-tiap jurusan memiliki besaran yang sama dimana tingkat kebutuhan yang berbeda di tiap jurusannya. Penetapan seperti ini berdampak pada proses pembelajaran, dimana kurang efektif dan tidak efisien. Seperti yang kita ketahui bahwa perhitungan pembiayaan pendidikan yang tepat akan membantu pihak sekolah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik melakukan penelitian pada tingkat mikro yaitu pada satuan pendidikan tingkat menengah kejuruan (SMK) di kota Tebing Tinggi tentang analisis faktor-faktor yang membedakan pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan SMK Negeri kota Tebing Tinggi. Analisis dilakukan per satuan pendidikan SMK Negeri, SMK Negeri 1, SMK Negeri 2, SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 4 kota Tebing Tinggi.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa yang membedakan pembiayaan pendidikan di setiap satuan pendidikan SMK Negeri Kota Tebing Tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sumber - Sumber Biaya Pendidikan

Dilihat dari sumber-sumbernya, biaya pendidikan ditingkat makro (Nasional) berasal dari :

1. Pendapatan negara dari sektor pajak yang beragam jenisnya.
2. Pendapatan dari sektor non pajak, misalnya dari pemanfaatan sumber daya alam dan produksi

nasional lainnya yang lazim dikategorikan ke dalam gas dan non migas.

3. Keuntungan dari ekspor barang dan jasa.
4. Usaha – usaha negara lainnya, termasuk dari investasi saham pada perusahaan negara (BUMN).
5. Bantuan dalam bentuk hibah (grant) dan pinjaman luar negeri (loan) baik dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, ADF, IMF, IDB, JICA, maupun pemerintah melalui kerjasama bilateral dan multilateral. Alokasi dana untuk setiap sektor pembangunan, termasuk pendidikan dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) setiap tahun.

Ditingkat provinsi dan kabupaten/kota, anggaran untuk sektor pendidikan sebagian besar berasal dari dana yang diturunkan dari pemerintah pusat ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pada Era Otonomi daerah sekarang, sebagian besar dana dalam APBD Provinsi dan kabupaten/kota diperoleh dari pusat yang disalurkan dalam bentuk paket yang disebut Dana Alokasi Umum (DAU) dan sebagian lagi ditambah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun terdapat pengecualian pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang dikuasai oleh negara (misalnya hasil tambang atau industri berskala nasional), mendapat bagian dalam proporsi tertentu dari keuntungan yang diperoleh dengan mengacu kepada UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Hal ini memungkinkan untuk dapat mengalokasikan dana yang lebih besar untuk sektor pendidikan.

Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran peserta didik dan sumbangan masyarakat. Tercatat dalam Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya pendidikan ditingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat. Sedangkan pada sekolah swasta berasal dari pada peserta didik atau yayasan.

Adapun sumber dana pendidikan untuk sekolah sesuai dengan PP 48/2008 menurut yang menyelenggarakan satuan pendidikan tersebut terdiri dari tiga jenis, yakni :

1. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, sumber pendanaan berasal dari :
 - a. Anggaran pemerintah.
 - b. Bantuan pemerintah daerah.
 - c. Pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua/ walinya.
 - e. Bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat
 - f. Sumber lainnya yang sah.
2. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sumber dananya berasal dari :
 - a. Bantuan pemerintah daerah.
 - b. Bantuan pemerintah.
 - c. Pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya.
 - e. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
 - f. Sumber lainnya yang sah.
3. Satuan pendidikan yang diselenggarakan / didirikan masyarakat, pendanaannya bersumber dari :
 - a. Bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - b. Bantuan dari pemerintah.
 - c. Bantuan dari pemerintah daerah.

- d. Pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya.
- f. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
- g. Sumber lainnya yang sah.

2. Pengelolaan Dana Pendidikan.

Dalam pengelolaan biaya/dana pendidikan ada beberapa hal yang harus dipahami, yakni :

1. Prinsip.

Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, terdiri atas prinsip umum dan prinsip khusus.

Yang termasuk dalam prinsip umum adalah :

- a. Prinsip keadilan. Adalah prinsip yang dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin dan kemampuan atau status sosial ekonomi.
- b. Prinsip efisiensi. Adalah prinsip yang dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pelayanan pendidikan. Efisiensi lebih menekankan pada kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya.
- c. Prinsip transparansi. Adalah prinsip yang dilakukan dengan memenuhi asas kepatuhan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan, sehingga dapat diaudit

atas dasar standar audit yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

- d. Prinsip akuntabilitas publik. Adalah memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Perencanaan.

Perencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan satuan pendidikan harus sejalan dengan :

- rencana pembangunan jangka panjang.
- rencana pembangunan jangka menengah.
- rencana kerja pemerintah.
- rencana strategis pendidikan nasional.
- rencana strategis daerah.

3. Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan.

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba yang berlaku bagi satuan pendidikan.

4. Pengawasan dan pemeriksaan.

Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

5. Pertanggungjawaban.

Dana pendidikan pada satuan pendidikan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

- a. Relevansi Pendidikan dengan Lapangan Kerja.

A. Input Pendidikan.

Input sekolah meliputi input manusia dan input fisik. Sumber fisik, seperti gedung, sarana prasarana. Karakteristik gedung, dimana disain yang memudahkan pengajaran dan terciptanya komunikasi antar kelompok serta adanya kondisi peralatan, serta jumlah dan mutu sarana, baik bahan pelajaran kejuruan maupun media belajar (audio visual dan lainnya), ruang belajar dan fasilitas pendukung lainnya dalam keadaan baik.

Sedangkan sumber manusia meliputi para guru, para administrator sekolah, kesekretarian, tata usaha, penyuluh / pembimbing dan petugas pendidikan lainnya.

Input bukan sekolah.

Faktor-faktor diluar sekolah turut mempengaruhi peserta didik. Pengaruh teman sebagai contoh yang umum selain minat belajar peserta didik itu sendiri dan tingkat sosial ekonomi orang tua (diukur dengan pendapatan keluarga, pendidikan orang tua, jumlah buku di rumah dan lain-lain). Input lain yang secara konsep termasuk dalam input non sekolah adalah sumbangan pendidikan pertama peserta didik.

B. Outcome Pendidikan.

Outcome pendidikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu konsumtif dan investasi. Aspek konsumtif berhubungan dengan kesenangan dan manfaat-manfaat yang diterima oleh peserta didik, keluarganya dan masyarakat. Peserta didik bisa mengalami konsumtif yang kurang baik, namun kegiatan-kegiatan seperti musik, olah raga, seni dan kerajinan, bisa membantu kesenangan peserta didik di sekolah, dimana terjadi manfaat konsumtif terhadap peserta didik tersebut. Keluarga merasa diringankan tugasnya ketika anaknya berada di sekolah. Begitu juga manfaat yang besar dirasakan oleh guru dan orang lain. Masyarakat mendapat manfaat konsumtif dengan berkurangnya tingkat kejahatan.

Komponen investasi mencakup berbagai output yang berkaitan dengan tujuan mempertinggi keahlian individu dan masyarakat dimasa depan. Karakteristik investatif dari

output pendidikan tidak bisa dipetik dalam waktu sekarang.

c. Pendidikan dan lapangan kerja.

Investasi pendidikan yang digunakan untuk mengembangkan potensi sumberdaya manusia, proses atau keuntungannya tidak diperoleh secepat dan sejelas investasi dalam kegiatan sektor ekonomi. Manfaat dan keuntungan pendidikan (benefit, return) pendidikan tidak saja bersifat ekonomi melainkan juga ada yang bersifat sosial (sosial return) (M. Fakry Gaffar, 1991).

Pendidikan adalah investasi jangka panjang, merupakan komoditi dalam pandangan ekonomi. Hal ini menempatkan bahwa penguasaan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dihasilkan dan dimiliki oleh individu-individu dapat diukur dari sisi nilai-nilai ekonomi yang dapat dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, melalui jenis pekerjaan yang bisa didapatkan dengan tingkat kompetensi yang dimiliki dan latar belakang pendidikan yang dijalani.

Relevansi diartikan sebagai keterkaitan pendidikan dan kegunaannya, terutama keterkaitan dengan lapangan kerja dan lulusannya dapat diserap ke dalam dunia kerja. Masalah ini merupakan salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang yang belum stabil dalam banyak hal, termasuk dalam perencanaan dan proyeksi ketenaga kerjaan. Indonesia belum memiliki peta tenaga kerja yang harus disediakan pendidikan.

d. Pendidikan Menengah Kejuruan.

Pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang menyiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan dari pada bidang-bidang pekerjaan lainnya (spesialisasi pekerjaan).

Pendidikan menengah kejuruan menurut Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu (penjelasan pasal 15 UU No.20 tahun 2003). Penekanan pada penyiapan

lulusan untuk dapat bekerja mempunyai makna keahlian khusus yang lebih spesifik dibanding pendidikan menengah umum. Peserta didik dibekali keterampilan yang bersifat aplikatif dengan berbagai jenis pekerjaannya yang ada di dunia usaha atau industri, juga kesempatan berwira usaha dengan keterampilan tertentu.

Pendidikan menengah kejuruan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional, mempunyai tujuan khusus, yakni :

1. Menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya.
2. Menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya.
3. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agar mampu mengembangkan diri dikemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
4. Membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata (Punaji Setyosari, 2012: 41).

2. Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer.

Data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber pertama melalui penyebaran kuesioner dan observasi langsung ke lapangan dengan menggunakan tehnik wawancara dengan responden yaitu Kepala SMK, bendahara sekolah, Kepala Tata Usaha (KTU) sekolah dan peserta didik SMK Negeri di kota Tebing Tinggi.

2. Data Sekunder.

Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi (laporan) dari berbagai instansi yang berhubungan dengan ruang lingkup penelitian, yakni Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi dan Biro Pusat Statistik (BPS) kota Tebing Tinggi.

3. Unit Analisis.

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang ada di kota Tebing Tinggi sebanyak 4 unit SMK.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik SMK kota Tebing Tinggi Negeri (4 unit) yang terdaftar pada tahun 2013 yaitu sebanyak 3137 orang.

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik SMK Negeri Tebing Tinggi yang duduk di kelas X sebanyak 1100 orang. Dari jumlah populasi tersebut dengan tingkat kelonggaran ketidak telitian sebesar 5%, maka dengan menggunakan rumus slovin diperoleh sampel sebesar: $n = \frac{1100}{1 + 1100 \times (0,05)^2} = \frac{1100}{3,75} = 293,3$

dibulatkan menjadi **293**

4. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Tiangulasi, yaitu menggunakan wawancara mendalam kepada pengelola SMK (kepala sekolah, bendahara dan kepala tata usaha) , angket (kuesioner) kepada peserta didik SMK Negeri kelas X, dan observasi ke daerah penelitian untuk mencari data dan informasi yang dibutuhkan serta study dokumentasi.

5. Teknik Analisis Data.

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap, yaitu :

1. Editing.
2. Coding.
3. Entri data.

HASIL PENELITIAN

1. Analisis total biaya yang dikeluarkan masing-masing SMK untuk membiayai proses pendidikan.

Terlihat persentase pengeluaran gaji dan non gaji pada SMK Negeri Kota Tebing Tinggi tertinggi pada SMK N 1, yakni 76,4% (Rp. 3.045.586.800) : 23,6% (Rp.939.960.000), pada SMK N 2, yakni 70,9% (Rp.2.270.700.000) : 29,1% (Rp.930.000.000), pada SMK N IV, 71% (Rp.1.845.823.200) : 29% (Rp.754.242.600) dan yang terendah pada SMK N 3, yakni 75% (Rp. 1.810.000.000) : 25% (Rp.603.600.000)

2. Analisis Sumber Dana masing - masing SMK.

Terlihat persentase dana yang bersumber dari pemerintah dan dana yang bersumber dari iuran komite pada SMK Negeri Kota Tebing Tinggi tertinggi pada SMK N 2,yaitu 80% (Rp. 2.560.560.000) : 20% (Rp.640.140.000) dan SMK N 3, yaitu 80% (Rp.1.931.520.000) : 20% (Rp. 482.880.000) dan SMK N 1, yaitu 79% (Rp. 3.149.566.800) : 21% (Rp.835.980.000) dan terendah pada SMK N 4, yaitu 73,9% (Rp.1.921.525.800) : 26,1%. (Rp.678.540.000)

3. Faktor-faktor yang membedakan pembiayaan pendidikan pada SMK Negeri Kota Tebing Tinggi.

Adapun faktor – faktor yang membedakan tingkat pembiayaan pendidikan pada SMK Negeri Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Besarnya dana Komite yang bervariasi pada masing-masing SMK.

- Pada SMK N 1 dana komite kelas X = Rp.70.000,-, kelas XI =Rp.65.000,- dan kelas XII=Rp.60.000,-.
- Pada SMK N 2 dana komite kelas X = Rp.70.000,-, kelas XII = Rp.60.000,- dan kelas XII = Rp.45.000,-
- Pada SMK N 3 dana komite kelas X = Rp.75.000,-, kelas XI = Rp.80.000,- dan kelas XII = Rp.90.000,-
- Pada SMK N 4 dana komite kelas X = Rp.90.000,-, kelas XI=Rp.85.000,- dan kelas XII=Rp.75.000,-

2. Jumlah peserta didik pada masing-masing SMK. Semakin banyak peserta didik yang bersekolah di SMK tersebut, semakin besar dana komite yang diterima sekolah tersebut untuk membiayai pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut.

3. Bantuan pendidikan peserta didik. Dalam hal ini pihak sekolah sangat mengharapkan pihak luar agar dapat berperan memberi bantuan kepada peserta didik yang berprestasi maupun peserta didik yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa.

4. Tingkat sosial ekonomi peserta didik. Semakin tinggi rata-rata status sosial ekonomi para peserta didik di suatu SMK, semakin besar jumlah pembiayaan pendidikan yang dikeluarkannya (biaya pribadi seperti uang jajan, dana transport, pembelian buku dan keperluan sekolah lainnya).

5. Jenis program studi yang dijalankan suatu SMK. Hal ini terlihat dari biaya praktek yang dikeluarkan peserta didik berbeda antara satu SMK dengan SMK lainnya, seperti pada SMK N 1 program studi Akuntansi dan Adm.Perkantoran, biaya praktek lebih kecil dibanding dengan biaya praktek yang dikeluarkan pada SMK N 3 program studi Tata Busana dan Tata Boga.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang membedakan pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan SMK Negeri 1,2,3 dan 4 kota Tebing Tinggi adalah :

1. Besarnya dana komite sekolah yang bervariasi antara kelas X, kelas XI dan kelas XII pada masing-masing SMK per peserta didik, terlihat :
 - a. Dari perbedaan dana komite yang bervariasi pada masing-masing SMK Negeri Kota Tebing Tinggi, tertinggi pada SMK Negeri 4 dan terendah pada SMK negeri 2. Hal ini terlihat pada mutu pendidikan, sistem pengajaran dan sarana prasarana di SMK Negeri 4 tersebut kondisinya sangat baik dan terus berkembang dengan rencana membuka 2 jurusan baru pada tahun ajaran yang akan datang ini.
 - b. Sedang pada SMK N 2, dana komite terkecil setelah mengalami penurunan dari status SMK rintisan sekolah bertaraf internasional dihapuskan. Walaupun demikian

- mutu pendidikan, sarana prasarana sekolah tetap baik, dimana terlihat SMK N2 ini masih termasuk sekolah favorit di kota Tebing Tinggi dibandingkan dengan SMK Negeri lainnya
2. Jumlah peserta didik pada masing-masing SMK. Semakin banyak jumlah peserta didik yang ada di satu SMK, semakin besar dana iuran komite yang diterima sekolah dari peserta didik untuk membiayai pembiayaan pendidikan di sekolah tersebut.
 3. Bantuan pendidikan peserta didik. Dalam hal ini pihak sekolah mengharapkan bantuan pihak luar agar berperan serta memberikan bantuan kepada peserta didik yang berprestasi maupun peserta didik yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa.
 4. Tingkat sosial ekonomi peserta didik. Semakin tinggi rata-rata status sosial ekonomi peserta didik di suatu SMK tergambar semakin besar pengeluaran pendidikan pribadi peserta didik tersebut seperti uang jajan, dana transfer, pembelian perlengkapan sekolah dan keperluan lainnya.
 5. Jenis program study yang dijalankan, hal ini berbeda antara satu SMK dengan SMK lainnya dalam hal biaya praktek yang dikeluarkan pihak sekolah maupun pribadi peserta didik.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Anwar, M.I. (1991), "Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan". Jakarta, Mimbar Pendidikan, No.1 Tahun X,1991.
- Arikunto, Suharsimi (2006), "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik". Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Bapeda Kota Tebing Tinggi (2013), "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi tahun 2011-2016". Tebing Tinggi.
- Biro Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi (2012) "Tebing Tinggi in Figures", BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Tebing Tinggi.
- Engkoswara dan Aan Komariah (2010), "Administrasi Pendidikan". Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang (2009), "Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan". Bandung, PT Remaja Rosdakarya.-
- ,(2008), "Pembiayaan Pendidikan : Landasan Teori dan Studi Empiris". Jakarta, Jurnal Pendidikan Dasar No.9, April 2008.
- Gaffar, M.F. (1991), "Konsep dan Filsosofi Biaya Pendidikan". Jakarta, Mimbar Pendidikan, No.1 Tahun X,1991.
- Hadijah, Diah (2012), "Analisis Pembiayaan Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Mutu Perguruan Tinggi", Wawasan Tri Dharma No 9 Tahun XXIV, April 2012.
- Mukhtar dan Iskandar (2009), " Orientasi Baru Supervisi Pendidikan". Jakarta, Gaung Persada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005, tentang "Standard Nasional Pendidikan".
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008, tentang "Pendanaan Pendidikan".
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2010, tentang "Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik

- yang Orangtua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan”.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009, tentang “Standar Biaya Operasi Nonpersonalia tahun 2009”
- Setyosari, Punaji (2012), “Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan”. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Suhardan, Dadang dan Riduwan, Enas. (2012), “Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan”. Bandung, Alfabeta.
- Sugiono (2010), “ Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D “. Bandung, Alfabeta.
- Sukirno, Sadono (2009), “ Mikro Ekonomi Tiori Pengantar”, Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa.
- ,(2010), “ Makro Ekonomi Tiori Pengantar“, Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa.
- Supriadi, Dedi (2006), “Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah”. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Tarigan, Robinson (2010), “Perencanaan Pembangunan Wilayah”. Jakarta, PT Bumi Aksara
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang “Sistem Pendidikan Nasional”. Jakarta.
- Undang-Undang No. 25 tahun 1995, tentang “ Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”. Jakarta.